



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

**PPID PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat disusun dengan baik. Penyusunan Laporan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2020, sebagai pertanggungjawaban tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang melalui keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 42 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan informasi tentang kegiatan PPID dengan harapan dapat memberikan manfaat demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Kepada semua pihak yang telah berkerja sama memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sampai dengan tersusunya laporan ini diucapkan terima kasih.

Pontianak, Januari 2021
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Ir. HERTI HERAWATI, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19680725 199303 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI... ..	ii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	2
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
a. Ruang Layanan	2
b. Penyediaan Akses Informasi.....	3
c. Jadwal dan Tata Cara Pelayanan	3
2. Sumber Daya Manusia.....	4
3. Anggaran Pelayanan Informasi	5
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
1. Jumlah Permohon Informasi Publik	5
2. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik	6
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya	6
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	7
D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	7
E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	8
DAFTAR LAMPIRAN	9

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2020

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan, menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara khususnya bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu di akomodasikan dengan cara mempermudah akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 , Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Informasi Pelayanan Publik;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 42 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik dalam kondisi baik, terdiri atas :

a. Ruang Layanan

Ruang Pelayanan Informasi dan dokumentasi berada di bagian depan, berdampingan dengan ruang tunggu yang di lengkapi dengan :

- ≥ Meja dan Kursi Untuk Petugas dan Tamu
- ≥ Struktur organisasi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- ≥ Visi dan Misi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- ≥ Komputer PC, Printer dan UPS
- ≥ Kipas Angin
- ≥ Blanko Permohonan Informasi
- ≥ Blanko Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi
- ≥ Buku tamu

b. Penyediaan Akses Informasi

Upaya untuk memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selain menyiapkan ruang khusus untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, juga telah melakukan pengembangan pelayanan melalui :

- ≥ Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id/>
- ≥ Email : dkp@kalbarprov.go.id
- ≥ Telepon : (0561) 732521
- ≥ Wa : 0821-5171-4514
- ≥ Instagram : [dislautkan.prov.kalbar](https://www.instagram.com/dislautkan.prov.kalbar)
- ≥ Facebook : Dkp Provinsi Kalimantan Barat

c. Jadwal Dan Tata Cara Pelayanan

Jadwal layanan informasi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Senin s/d Kamis

- ≥ Jam Layanan : 07.15 – 15.30 WIB
- ≥ Jam Istirahat : 12.00 – 13.45 WIB

Jum'at

- ≥ Jam Layanan : 07.15 – 11.30 WIB
- ≥ Jam Istirahat : 11.30 – 12.45 WIB
- ≥ Jam Selesai Pelayanan : 16.00 WIB

Dimasa Pandemi Covid-19, pelayanan permohonan informasi publik pada ruang pelayanan, mengikuti protokol kesehatan sebagai Berikut :

- ≥ Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
- ≥ Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis *alkohol / handsanitizer*.
- ≥ Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mempercepat pelayanan informasi publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, dengan keanggotaan tim sebagai berikut ;,

a. TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA IFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KELUATAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan Perikanan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau – Pulau Kecil dan Pengawasan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Renja dan Monev	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota

b. PEMBANTU PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA IFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KELUATAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Jamianto, S.Pi	Koordinator
2.	M. Natsir	Anggota
3.	Desi Hervina Dewi, S.Pi	Anggota
4.	Sinar Suryadi, S.Pi	Anggota
5.	Sutrisno, Am.Md	Anggota
6.	Marlina	Anggota
7.	Tugiono	Anggota

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Dukungan anggaran untuk pelayanan informasi dan dokumentasi pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dibebankan pada DPA Nomor : 903/228/DPPA-SKPD/BKAD-B/2020 Tahun Anggaran 2020. Khususnya pada kegiatan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebesar Rp. 21.350.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah). Anggaran Kegiatan PPID digunakan untuk pembayaran honor tim, belanja ATK, perlengkapan komputer, pengadaan dan jilid.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://dislautkan.kalbarprov.go.id/> terdiri dari :

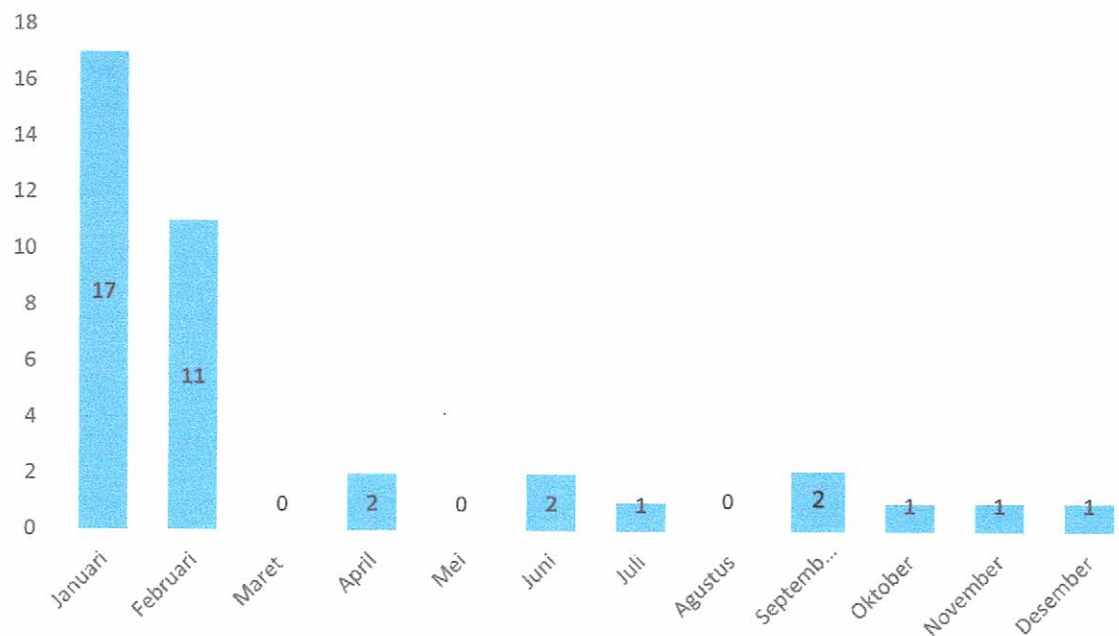
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Adapun rincian pelayanan informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat priode Januari s/d Desember 2020 baik yang datang secara langsung (melalui desk layanan), melalui surat dan melalui email sebanyak 38 permohonan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Pemohon
1.	Januari	17
2.	Februari	11
3.	Maret	-
4.	April	2
5.	Mei	-
6.	Juni	2
7.	Juli	1
8.	Agustus	0
9.	September	2
10.	Oktober	1
11.	November	1
12.	Desember	1
	Jumlah	38



2. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi

Jangka waktu untuk memberikan layanan permohonan informasi publik telah diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari dengan memberikan alasan tertulis.

Berdasarkan SOP Pelayanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, waktu pelayanan permohonan informasi publik maksimal 10 hari kerja. Waktu pelayanan informasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 adalah 1 s/d 7 hari kerja, baik yang datang ke ruangan pelayanan informasi maupun permohonan informasi melalui surat, Email dan Whatsapp.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dapat Dikabulkan Sebagian atau seluruhnya

Jumlah permohonan informasi publik dikabulkan sebagian ada 2 permohonan, yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 36 permohonan. Informasi yang dikabulkan sebagian yaitu permohonan informasi tentang data produksi ikan asin kabupaten / kota per jenis ikan asin. Data tersebut adalah data dikabupaten / kota namun belum didokumentasikan oleh Kabupaten / Kota perjenis ikan asin sehingga data tersebut belum ada di provinsi. Demikian juga

dengan data hasil tangkap ranjungan tahun 2011 – 2019, data tersebut belum didokumentasikan oleh Provinsi. Karena data di provinsi merupakan rakapitulasi data dari kabupaten / kota sehingga ada beberapa data yang belum didokumentasikan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang di tolak.

Permohonan data informasi di tahun 2020 kepada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, tidak ada yang di tolak.

D. PENYELESAIN SENGKETA INFORMASI

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 tidak pernah menerima keberatan dari pemohon informasi publik atas layanan informasi publik yang di berikan. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan pemohon informasi sehingga ditahun 2020 tidak ada sengketa informasi.

E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan layanan informasi publik kepada pemohon belum optimal. Karna masih ada kendala kendala yang dihadapi yaitu kendala eksternal dan internal.

Kendala internal dalam layanan informasi publik yaitu sumber daya manusia. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama tentang keterbukaan informasi dan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Adapun kendala eksternal yang dihadapi yaitu banyak permohonan informasi memohon data yang sangat terinci sedangkan informasi atau data tersebut adalah data yang ada di kabupaten / kota yang mana data tersebut merupakan data yang tidak wajib untuk dilaporkan oleh Kabupaten/Kota, sehingga PPID pembantu Dinas Kelautan dan ke provinsi sehingga PPID Pembantu dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat belum bisa menyajikan data tersebut.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PPID pembantu dinas kelautan dan perikanan provinsi kalimantan barat akan berusaha untuk meningkatkan layanan informasi publik. Berdasarkan kendala yang dihadapi ditahun 2020 maka ada beberapa yang perlu diperbaiki antara lain :

1. Mengadakan sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada ASN Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat melalui apel pagi atau arahan dalam pertemuan dan bagi petugas secara langsung memberikan pelayanan akan diusulksn untuk mengikuti workshop atau seminar tentang keterbukaan informasi publik.
2. Akan dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap 6 bulan dan melengkapi data – data bidang keluatan perikanan. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai proses menuju transparansi informasi kepada masyarakat, maka diharapkan pengelolaan dan penyediaan data agar lebih ditingkatkan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi bagi semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut.

Demikian laporan layanan Informasi Publik Tahun 2020 sebagai gambaran dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 42 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 153 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Daftar Informasi Publik yang diusulkan untuk di kecualikan.
4. Protokol Kesehatan Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
5. Register Permohonan Informasi Publik Bulan Januari s/d Desember 2020
6. Rekapitulasi Layanan Informasi Tahun 2020
7. Evaluasi atas saran dan perbaikan, masukan dan harapan dari pemohon informasi publik
8. Dokumentasi Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Dokumentasi monitoring dan evaluasi Badan Publik Tahun 2020 dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
10. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 05 / KI Kalbar/SK/11/2020 Tentang Penetapan Kualifikasi Pemingkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16, Telp. (0561) 732521/ Faks. (0561) 766073

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

e-mail : dkp@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 135 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berkewajiban membuat Daftar Informasi Publik;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di Lapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

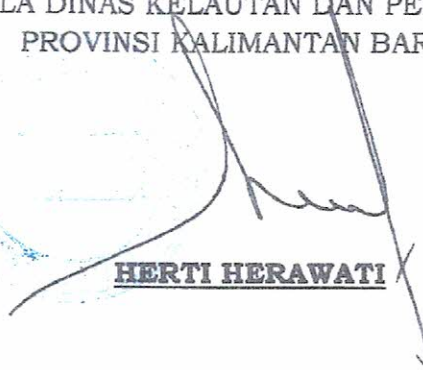
Menetapkan :

KESATU : Daftar informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan.
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2020

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HERTI HERAWATI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat selaku PPID Utama

Lampiran
Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : 135 Tahun 2020
Tanggal : 30 Juli 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai/PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Alamat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
2.	Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
4.	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
5.	Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
6.	Profil Pimpinan Badan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
7.	Profil Singkat Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
8.	Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
9.	Penanggungjawab Program Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
10.	Target dan Capaian Program serta Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
11.	Jadwal Pelaksana Program dan Kegiatan	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
12.	DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
13.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
14.	TAPKIN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai/PENANGGUNG JAWAB	PEWANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
	2	3	4	5	6	7
15.	Neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
16.	Laporan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
17.	Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2020	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
18.	LHKPN Pejabat yang di Verifikasi KPK	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
19.	Register Permohonan Informasi Publik	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
20.	SK. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun	Sekretaris	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
21.	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang yang di lakukan Pejabat Badan Publik	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
22.	Tata Cara Memperoleh Informasi	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
23.	Tata Cara Pengajuan Keberatan	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
24.	Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sangketa ke Komisi Informasi	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-

II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai/PENANGGUNG JAWAB	PEWANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
	2	3	4	5	6	7
1.	Informasi Prakiraan Cuaca	Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	2020 Pontianak	Hard Copy	-
2.	Informasi Prakiraan Tinggi Gelombang	Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	2020 Pontianak	Hard Copy	-

III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Restra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2018 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
2.	SOP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2019 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
3.	Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
4.	Data Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
5.	Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Rencana Kerja dan Monev.	Sekretaris	2015 - 2019 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
6.	Laporan Inventarisasi Aset	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
7.	Peraturan/Kebijakan/Keputusan	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	2019, 2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
8.	Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang/Jasa	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
9.	Perjanjian Kerja Sama	Kasubbag Umum dan Aparatur	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	2020 Pontianak	Hard Copy	1 Tahun
10.	Standar Pelayanan Publik (Penerbitan Pertimbangan Teknis Bidang Kelautan	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	2020 Pontianak	Hard Copy	-
11.	Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	2016, 2019 Pontianak	Hard Copy	-

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


Herti Herawati
HERTI HERAWATI



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
- b. bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PPID-Pembantu dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

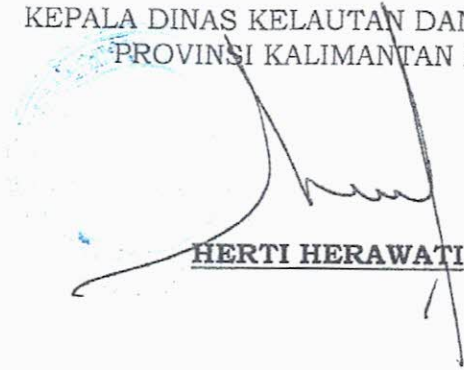
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : PPID Pembantu mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID; dan
 - g. Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID setiap 6 (enam) bulan sekali, yang meliputi :
 - (1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - (2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - (3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - (4) Alasan penolakan permohonan informasi publik

- KETIGA : PPID Pembantu melaksanakan fungsi :
- a. Penghimpunan informasi publik lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Penataan dan penyimpanan informasi publik lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Segala akibat dari terbitnya Keputusan ini adalah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Februari 2020

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, .



HERTI HERAWATI

LAMPIRAN 1**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap.	Anggota
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.	Anggota
6.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan.	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Renja dan Monev.	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset	Anggota

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




HERTI HERAWATI

LAMPIRAN 2**TIM PEMBANTU PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jamianto, S.Pi	Koordinator
2.	M. Nasir, S.Pi	Anggota
3.	Desi Hervina Dewi, S.Pi	Anggota
4.	Sinar Suryadi, S.Pi	Anggota
5.	Sutrisno, A.Md	Anggota
6.	Marlina	Anggota
7.	Tugiono	Anggota

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HERTI HERAWATI

LAMPIRAN 3

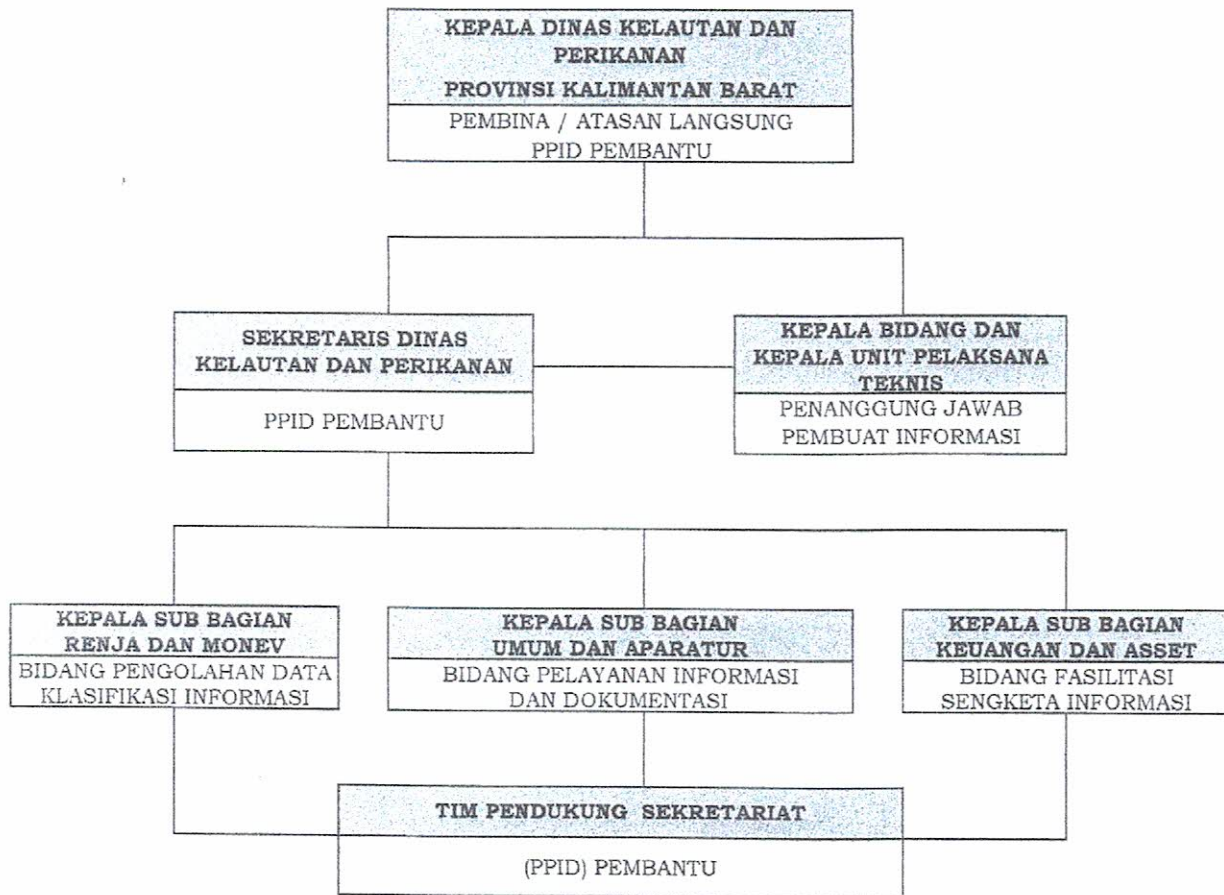
**PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-P2).	Penanggung Jawab
2.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPT-PMHP).	Penanggung Jawab
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL).	Penanggung Jawab

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


HERTI HERAWATI

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



PONTIANAK, 3 FEBRUARI 2020

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HERTI HERAWATI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073
Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dkp@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 78116

Pontianak, 8 Juli 2020

Kepada

Yth. PPID Utama
Provinsi Kalimantan Barat
di -

Pontianak

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 523.800/ 557 /DKP-Sekr. 1

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyampaian Usulan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk softcopy.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai Bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat



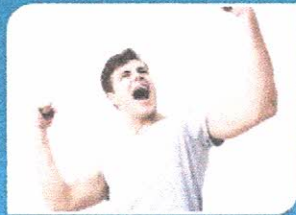
I. HERTI HERAWATI, NMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 2 003

**USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020**

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
1.	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	Dapat dibuka setelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (<i>incracht</i>)
2.	Laporan Keuangan Sebelum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)
3.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
4.	Rencana gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	Dapat di buka dalam hal kepentingan pemeriksaan



PROTOKOL KESEHATAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19



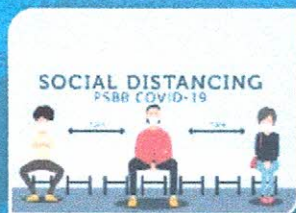
**PASTIKAN ANDA KE TEMPAT LAYANAN
PUBLIK DALAM KEADAAN SEHAT
(TIDAK DEMAM, BATUK DAN GEJALA FLU
SERTA GEJALA SAKIT LAINYA)**

**MENGUKUR SUHU SEBELUM
MEMASUKI AREA KANTOR**



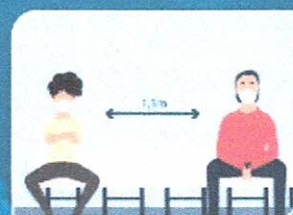
**CUCI TANGAN DENGAN SABUN ATAU
TELAH MENGGUNAKAN HAND SANITIZER
SEBELUM MASUK KE DALAM RUANGAN
PELAYANAN**

**SELALU MENGGUNAKAN MASKER
SELAMA BERADA DI LINGKUNGAN
TEMPAT PELAYANAN PUBLIC**



**TETAP MENJAGA JARAK
(PHYSICAL DISTANCING)
ANTARA 1 - 2 METER
DENGAN ORANG LAIN**

**MAKSIMAL DUA (2) ORANG DALAM
SEKALI PELAYANAN SEBIHINYA
DAPAT MENUNGGU DI RUANG TUNGGU
DENGAN TETAP MENJAGA JARAK
DAN HINDARI KERUMUNAN**





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PPID PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Sutan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073
 PONTIANAK

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

E-mail : admin@dislautkan.kalbarprov.go.id

Bulan : Januari 2020

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Tanggal	Nama	Alamat dan Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Pengumuman Informasi		Status Informasi		Bentuk		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara	
						Ya	Tidak	Dibawah Pengawasan	Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengubah	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Informasi		Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2 Januari 2020	Sukawantono	Jl. Martadinata gg pala 1	BPS Prov Kalbar	Budidaya Rumpuk laut		Ya		Sudah										
2	2 Januari 2020	Adi	Paloh-Sambas	Swasta	Penyerahan SKP		Ya		Sudah										
3	7 Januari 2020	Hendra Apris Setiawan	PT. Krisbow Indonesia	Swasta	Penawaran Genet	Proposal	Ya		Sudah								6 Januari 2020	Tidak ada	
4	8 Januari 2020	M. Daud Tahir	Dusun Karya maju Desa Sui Belidak	Swasta	Koordinasi SIPI	Pembuatan SIPI	Ya		Sudah								6 Januari 2020	Tidak ada	
5	9 Januari 2020	Syahrul Robianto	KP. Karya Indah	Polri	Tentang Pelabuhan Perikanan	Dalam Rangka Sidik	Ya		Sudah								7 Januari 2020	Tidak ada	
6	9 Januari 2020	Libertus Subrata	Gg. Keluarga	Polri	Perizinan Cold Storage Bongkar Muat Ikan	Dalam Rangka Sidik	Ya		Sudah								8 Januari 2020	Tidak ada	
7	12 Januari 2020	Rizky Kharanic noor	Sambas	Wiraswasta	Konsultasi	Dalam Rangka Sidik	Ya		Sudah								9 Januari 2020	Tidak ada	
8	13 Januari 2020	Elko Ainal Firdaus	Pontianak	Swasta	Penawaran Genet	Memperoleh Informasi	Ya		Sudah								9 Januari 2020	Tidak ada	
9	13 Januari 2020	Roy Means Djambur	Maluku Tenggara Prov. Maluku	Swasta	Penawaran Genet	Proposal	Ya		Sudah								13 Januari 2020	Tidak ada	
10	13 Januari 2020	Herman Yosep	Jl. Purnama 2 Komplek Indah Purnama Indah B2	Swasta	Koordinasi Budidaya Mutiara laut	Tindak Lanjut Hasil Survei Th 2018 untuk Usaha Budidaya Mutiara	Ya		Sudah								13 Januari 2020	Tidak ada	
11	16 Januari 2020	Januardi	Dusun Keppuyu RT09 Desa Tj. Satai	Swasta	Permohonan STKA	Perluasan Area Tangkap	Ya		Sudah								13 Januari 2020	Tidak ada	
12	16 Januari 2020	Ramli	Jl. Tabrani Ahmad Gg Maria I no 78	Swasta	Koordinasi Tindak Lanjut SIPI Dan SIPI	Memperoleh Informasi	Ya		Sudah								13 Januari 2020	Tidak ada	
13	17 Januari 2020	Ruslan	Kab. Kapuas Hulu	PNS	Bangunan Aset TPI Kota	Memperoleh Informasi	Ya		Sudah								16 Januari 2020	Tidak ada	
14	17 Januari 2020	M. Daud Tahir	Dusun Karya maju Desa Sui Belidak	Swasta	Program Kegiatan Perikanan	UPDATING Data	Ya		Sudah								16 Januari 2020	Tidak ada	
15	27 Januari 2020	Koris Parhusip	Desa Kapur	Nelayan	Koordinasi SIPI	Pembuatan SIPI	Ya		Sudah								17 Januari 2020	Tidak ada	
16	29 Januari 2020	Juliawan	Jl. Cendrawasih No. 59 B	Sawasta	Informasi tentang Rekomendasi Rekomendasi Kapal	Mau Mengadakan Pelatihan Membuat Surat Izin Kapal	Ya		Sudah								17 Januari 2020	Tidak ada	
17	31 Januari 2020	Adriani Hindrani	Jl Karya baru Bati Agung I	Mahasiswa	Data Prokduksi Ikan asin	Untuk penelitian Tugas Akhir	Ya		Sebagian Belum didokumentasikan								27 Januari 2020	Tidak ada	
																	29 Januari 2020	Tidak ada	
																	31 Januari 2020	Tidak ada	



REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Bulan : Februari 2020

No	Tanggal	Nama	Alamat dan Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran		
							Dibawah Pengawasan	Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan	Biaya	Cara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4 Februari 2020	Dea Clara Davina	Jl. Sei Raya Dalam	Swasta	Informasi Seputar Kegiatan, Sosialisasi dan Rakor Perumahan Permintaan data Prokuduksi Kalbar	Promosi Akomodasi Ruang dan Kegiatan	Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			4 Februari 2020	Tidak ada		
2	10 Februari 2020	Robertua Amir	POLITEKNIK NEGERI PTK	Mahasiswa	Perumahan data Skripsi	Pembuatan Proposal Tugas Akhir Untuk Penelitian Skripsi	Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			10 Februari 2020	Tidak ada		
3	11 Februari 2020	Intan Safitri		Mahasiswa	Perumahan data Skripsi	Untuk Penelitian Skripsi	Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			11 Februari 2020	Tidak ada		
4	11 Februari 2020	Melidida Guidino Rangga Win	Untan Fak. Ekonomi dan Bisnis	Mahasiswa	Perumahan Data Jumlah Produksi Ikan, Nelayan, Jenis Kapal, Alat Tangkap	Bahan Penyusunan Skripsi	Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			11 Februari 2020	Tidak ada		
5	12 Februari 2020	Endang Subiastuti	Balmon	PNS	Koordinasi Surat dari Balmon Pontianak		Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			12 Februari 2020	Tidak ada		
6	12 Februari 2020	Aurriel Febby Ananda	Jln Yam Sabran Gg Petagon	Mahasiswa	Mengambil Data Untuk Penelitian Skripsi	Untuk Penelitian Skripsi	Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			12 Februari 2020	Tidak ada		
7	13 Februari 2020	Mohammad Rahyuni	Jl. Antasari no 6 Putushau	PNS	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Hasil Pendaratan	Laporan Rekapitulasi Hasil Pendaratan Ikan	Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			13 Februari 2020	Tidak ada		
8	18 Februari 2020	Yolanda	Hotel Borneo	Swasta/Marketing	Penawaran Paket Room dan Meeting	Penggunaan Room dan Ruang Meeting	Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			18 Februari 2020	Tidak ada		
9	24 Februari 2020	Mahmud (A.am)	Jl Tannay1	Swasta	Tata Cara Pengiriman Ikan	Pengiriman Ikan Tomam	Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			24 Februari 2020	Tidak ada		
10	25 Februari 2020	Sistilia Kinda	Hotel Ibis	Swasta	Penawaran Paket Room dan Meeting	Terkaty Kegiatan di Hotel Mercure dan Ibis	Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			25 Februari 2020	Tidak ada		
11	27 Februari 2020	Nur Azis Ribowo	Markas Komando Spoc No 4/	Pengawas Lingkungan Hidup	Terkait Area Konservasi	Penegakan Hukum	Ya	Sudah	✓	✓	✓	✓	✓			27 Februari 2020	Tidak ada		



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PPID PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Sultan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073
 PONTIANAK

Website : <http://dislaulkam.kalbarprov.go.id> E-mail : admin@dislaulkam.kalbarprov.go.id

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Bulan : April 2020

No	Tanggal	Nama	Alamat dan Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi		Jenis Permohonan		Keputusan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara			
							Dibawah Pengawasan	Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan		Pemborihan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara		
1	21	Muhammad Ramadhani	Rhmadhani621@gmail.com, Jl. Ampere Raya Sui Ambawang Komp. Kenila Garden No. C11	Mahasiswa	Data Pembedayaan Perikanan Yang Masih Aktif	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	21 April 2020	Muhammad Ramadhani	Rhmadhani621@gmail.com, Jl. Ampere Raya Sui Ambawang Komp. Kenila Garden No. C11	Mahasiswa	Data Pembedayaan Perikanan Yang Masih Aktif	Untuk Tugas Kuliah	Ya		Sudah	✓			✓				23 April 2020	Tidak ada	
2	22 April 2020	Retno Wulandari	Wulandari.retno.2369@gmail.com - Jl. Padat Karya Komp. Palestina Indah Permai 5 C.7	Mahasiswa	Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	Untuk Tugas Kuliah	Ya		Sudah	✓			✓				22 April 2020	Tidak ada	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PPID PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Sultan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073
PONTIANAK



Website : <http://dislaudkam.kalbarprov.go.id> E-mail : admin@dislaudkam.kalbarprov.go.id

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Bulan : Juni 2020

No	Tanggal	Nama	Alamat dan Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Pengunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara	
							Dibawah Pengawasan	Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis			Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4 Juni 2020	Winda Eka Putri	windaekaputri@student.untan.ac.id	Mahasiswa	Data Hasil Tangkap Ranjangan 2011 - 2019	Keperluan Kuliah	Ya		Sebagian Belum didokumentasikan	✓		✓					9 Juni 2020	Tidak ada	
2	19 Juni 2020	Heri Mustari	Jl. Tenku Umar	Wiraswasta	Data Industri Pengolahan Kebutuhan Garam, Data Pelayanan Perizinan, Pambudidaya Ikan	Untuk Kebutuhan Bahan Komisi 4 DPRRI a/n. Daniel Johan	Ya		Sudah		✓	✓					23 Juni 2020	Tidak ada	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PPID PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Sultan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073
 PONTIANAK
 Website : <http://disiautkan.kalbarprov.go.id>
 E-mail : admin@disiautkan.kalbarprov.go.id

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Bulan : Juli 2020

No	Tanggal	Nama	Alamat dan Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yang dikusulkan		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran						
							Dibawah Pengawasan	Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara					
1	2	3	4	5	6	7	Ya	Tidak	8	9	10	Soft Copy	Hard Copy	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1 Juli 2020	Yudhi Hartanto	Jl. M.Sood no.6 Pontianak	Swasta	Lokasi Tambak Kab.Ketapang	SID Irigasi Tambak Kab. Ketapang	Ya				Sudah										1 Juli 2020	Tidak ada	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PPD PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Sultan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073
 PONTIANAK

Website : <http://dialautkan.kalbarprov.go.id> E-mail : admin@dialautkan.kalbarprov.go.id

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Bulan : September 2020

No	Tanggal	Nama	Alamat dan Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi yang dikususkan		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
							Dibawah Pengawasan Ya Tidak	Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Menurut Salinan	Pembertubahan Tertulis			Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	18 September 2020	Evan	II. Ayari No. 121	Staf BPDASHIL Kal	Informasi Zona	Overlay Peta	Ya		Sudah	√	√	√	√				18 September 2020	Tidak ada	
2	18 September 2020	Reny Kianti dan Reza Alhanda	Komp. Raiser II Raya Bogor Km-47 Nanggower Mekar Cibinong Jawa Barat	Peneliti BRPL	Pengumpulan Data	Penelitian Pengujian Habitat, Biologi dan Stok SDI serta Karakteristik Perikanan di WPP 711	Ya		Sudah	√	√	√	√				23 September 2020	Tidak ada	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PPD PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Sutan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073
 PONTIANAK

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> E-mail : admin@dislautkan.kalbarprov.go.id

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Bulan : Oktober 2020

No	Tanggal	Nama	Alamat dan Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi yang dikususkan		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
							Dibawah Penguasaan	Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan	Perubahan Tertulis			Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
							Ya	Tidak											
1	19 Oktober 2020	Fatmawati	Jl. Ayani No. 121	Mahasiswa	Permohonan Data	Penyusunan Skripsi	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Ya		Sudah								21 Oktober 2020	Tidak ada	-



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PPID PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Sultan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073
 PONTIANAK

Website : <http://dislautkam.kalbarprov.go.id> E-mail : admin@dislautkam.kalbarprov.go.id

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Bulan : November 2020

No	Tanggal	Nama	Alamat dan Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yang dikuasakan		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran		
							Dibawah Pengawasan	Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pembentahan Terulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	11 November 2020	Yusi Apriliani	UMP	Mahasiswa	Data DKP	Penyusunan Skripsi	Ya	-	Sudah	√	√	√	√	-	-	-	16 Nobeember 2020	-	-



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PPID PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Sultan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073
 PONTIANAK

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> E-mail : admin@dislautkan.kalbarprov.go.id

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Bulan : Desember 2020

No	Tanggal	Nama	Alamat dan Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi yang dikuasakan		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
							Dibawah Pengawasan	Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis			Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
							Ya	Tidak											
1	4 Desember 2020	Laudatu Trifosa A	Jl. Tambak Bayan No. 4 Setiman	Mahasiswa	Perihal Data dan Pengisian Kuesioner	Penulisan Skripsi	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Ya	-	Sudah	-	-	-	✓	-	-	-	7 Desember 2020	-	Tidak ada

**RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI
(JANUARI S/D DESEMBER 2020)**

NO.	TANGGAL	PEMOHON INFORMASI	WAKTU YANG DIPERLUKAN	PERMOHONAN INFORMASI			KETERANGAN
				DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	ALASAN DITOLAK	
1	2 Januari 2020	Sukawantono	4 Hari	√			
2	3 Januari 2020	Adi	4 Hari	√			
3	7 Januari 2020	Hendra Apris Setiawan	1 Hari	√			
4	8 Januari 2020	M. Daud Tahir	1 Hari	√			
5	9 Januari 2020	Syahrul Robianto	1 Hari	√			
6	9 Januari 2020	Libertus Subrata	1 Hari	√			
7	12 Januari 2020	Rizky Khairanie noor	2 Hari	√			
8	13 Januari 2020	Eko Ainal Firdaus	1 Hari	√			
9	13 Januari 2020	Roy Means Djambumr	1 Hari	√			
10	13 Januari 2020	Herman Yosep	1 Hari	√			
11	16 Januari 2020	Januardi	1 Hari	√			
12	16 Januari 2020	Ramli	1 Hari	√			
13	17 Januari 2020	Ruslan	1 Hari	√			
14	17 Januari 2020	M. Daud Tahir	1 Hari	√			
15	27 Januari 2020	Korris Parhusip	1 Hari	√			
16	29 Januari 2020	Juliawan	1 Hari	√			
17	31 Januari 2020	Adriani Hindrani	1 Hari		√		
18	4 Februari 2020	Dea Clara Davina	1Hari	√			
19	10 Februari 2020	Robertua Amir	1 Hari	√			

**EVALUASI ATAS SARAN DAN PERBAIKAN, MASUKAN DAN HARAPAN DARI PEMOHON INFORMASI PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020**

NO.	TANGGAL	PEMOHON	SARAN PERBAIKAN, MASUKAN DAN HARAPAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	9 Januari 2020	Syahrul Robianto	- Sangat Membantu kita untuk mendapatkan informasi dan pengembangan	- Akan dipertahankan	
2.	9 Januari 2020	Libertus Subrata	- Pertahankan, mantap	- Akan dipertahankan	
3.	1 Juli 2020	Yudhi Hartanto	- Pelayanan Data Sudah Baik - Masukan kami untuk data mungkin perlu di update - Harapan kami bisa mendapatkan data	- Sebagian data akan diupdate setiap 6 bulan	Akan ditindaklanjuti tahun 2021
4.	18 September 2020	Evan	- Lanjutkan dan tingkatkan - Tambahan WA	- Akan ditingkatkan - Sudah Ditindaklanjuti	No. WA DKP Prov. Kalbar : 082151714514
5.	11 November 2020	Yusi Apriliani	- Agar Pelayanan selalu di jaga dan lebih ditingkatkan	- Akan ditingkatkan	
6.	4 Desember 2020	Lisudatu Trifosa	- Semoga Pelayanan Semakin Baik	- Akan ditingkatkan	

PELAYANAN INFORMASI (Bulan Januari dan Februari 2020)



Koordinasi / Konsultasi Pembuatan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)



Koordinasi / Konsultasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (P2KP)

PELAYANAN INFORMASI (Bulan September 2020)



Permohonan Zona Inti Overlay Peta



Pengumpulan Data Dalam Rangka Penelitian Pengkajian Habitat Biologi dan Stok SDI

**RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI
(JANUARI S/D DESEMBER 2020)**

NO.	TANGGAL	PEMOHON INFORMASI	WAKTU YANG DIPERLUKAN	PERMOHONAN INFORMASI			KETERANGAN
				DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	ALASAN DITOLAK	
1	2 Januari 2020	Sukawantono	4 Hari	√			
2	3 Januari 2020	Adi	4 Hari	√			
3	7 Januari 2020	Hendra Apris Setiawan	1 Hari	√			
4	8 Januari 2020	M. Daud Tahir	1 Hari	√			
5	9 Januari 2020	Syahrul Robianto	1 Hari	√			
6	9 Januari 2020	Libertus Subrata	1 Hari	√			
7	12 Januari 2020	Rizky Khairanie noor	2 Hari	√			
8	13 Januari 2020	Eko Ainal Firdaus	1 Hari	√			
9	13 Januari 2020	Roy Means Djambumr	1 Hari	√			
10	13 Januari 2020	Herman Yosep	1 Hari	√			
11	16 Januari 2020	Januardi	1 Hari	√			
12	16 Januari 2020	Ramli	1 Hari	√			
13	17 Januari 2020	Ruslan	1 Hari	√			
14	17 Januari 2020	M. Daud Tahir	1 Hari	√			
15	27 Januari 2020	Korris Parhusip	1 Hari	√			
16	29 Januari 2020	Juliawan	1 Hari	√			
17	31 Januari 2020	Adriani Hindrani	1 Hari		√		
18	4 Februari 2020	Dea Clara Davina	1Hari	√			
19	10 Februari 2020	Robertua Amir	1 Hari	√			

NO.	TANGGAL	PEMOHON INFORMASI	WAKTU YANG DIPERLUKAN	PERMOHONAN INFORMASI			KETERANGAN
				DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	ALASAN DITOLAK	
20	11 Februari 2020	Intan Safitri	1 Hari	√			
21	11 Februari 2020	Melfidoa Guidino Rangga Win	1 Hari	√			
22	12 Februari 2020	Endang Subiastuti	1 Hari	√			
23	12 Februari 2020	Auriel Febby Ananda	1 Hari	√			
24	13 Februari 2020	Muhammad Rahyuni	1 Hari	√			
25	18 Februari 2020	Yolanda	1 Hari	√			
26	24 Februari 2020	Mahmud (A,an)	1 Hari	√			
27	25 Februari 2020	Sisilia Rinda	1 Hari	√			
28	27 Februari 2020	Nur Azis Ribowo	1 Hari	√			
29	21 April 2020	Muhammad Ramadhani	2 Hari	√			
30	22 April 2020	Retno Wulandari	1 Hari	√			
31	4 Juni 2020	Winda Eka Putri	5 Hari		√		
32	19 Juni 2020	Heri Mustari	4 Hari	√			
33	1 Juli 2020	Yudhi Hartanto	1 Hari	√			
34	18 September 2020	Evan	1 Hari	√			
35	23 September 2020	Reny Rianti dan Reza Alnanda	1 Hari	√			
36	19 Oktober 2020	Fatmawati	2 Hari	√			
37	11 November 2020	Yusi Apriliani	3 Hari	√			
38	4 Desember 2020	Lisudatu Trifosa A	3 Hari	√			

**EVALUASI ATAS SARAN DAN PERBAIKAN, MASUKAN DAN HARAPAN DARI PEMOHON INFORMASI PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020**

NO.	TANGGAL	PEMOHON	SARAN PERBAIKAN, MASUKAN DAN HARAPAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	9 Januari 2020	Syahrul Robianto	- Sangat Membantu kita untuk mendapatkan informasi dan pengembangan	- Akan dipertahankan	
2.	9 Januari 2020	Libertus Subrata	- Pertahankan, mantap	- Akan dipertahankan	
3.	1 Juli 2020	Yudhi Hartanto	- Pelayanan Data Sudah Baik - Masukan kami untuk data mungkin perlu di update - Harapan kami bisa mendapatkan data	- Sebagian data akan diupdate setiap 6 bulan	Akan ditindaklanjuti tahun 2021
4.	18 September 2020	Evan	- Lanjutkan dan tingkatkan - Tambahan WA	- Akan ditingkatkan - Sudah Ditindaklanjuti	No. WA DKP Prov. Kalbar : 082151714514
5.	11 November 2020	Yusi Apriliani	- Agar Pelayanan selalu di jaga dan lebih ditingkatkan	- Akan ditingkatkan	
6.	4 Desember 2020	Lisudatu Trifosa	- Semoga Pelayanan Semakin Baik	- Akan ditingkatkan	

PELAYANAN INFORMASI (Bulan Januari dan Februari 2020)



Koordinasi / Konsultasi Pembuatan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)



Koordinasi / Konsultasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (P2KP)

PELAYANAN INFORMASI (Bulan September 2020)



Permohonan Zona Inti Overlay Peta



Pengumpulan Data Dalam Rangka Penelitian Pengkajian Habitat Biologi dan Stok SDI

PELAYANAN INFORMASI
(Bulan Desember)



**DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI
BADAN PUBLIK TAHUN 2020
DARI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



DOC DKP SEKR 2020



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 05/KI.KALBAR/SK/11/2020

TENTANG

PENETAPAN KUALIFIKASI PEMERINGKATAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA BADAN PUBLIK DALAM RANGKA
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik di Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se- Kalimantan Barat Tahun 2020.
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara terukur, akuntabel dan transparan serta telah mendapatkan nilai untuk dikonversikan dalam kualifikasi pemeringkatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Kualifikasi Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1309);

4. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2018,
5. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 02/KI.KALBAR/SK/06/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, tanggal 5 November 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN KUALIFIKASI PEMERINGKATAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN PUBLIK DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

KESATU

Penetapan Kualifikasi Pemeringkatan Badan Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagaimana Kualifikasi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif pada Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat setelah melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 memberikan Kualifikasi dan Pemeringkatan Badan Publik sebagai berikut :

1. INFORMATIF, Nilai 85 – 100 sebagai Zona Hijau.
2. MENUJU INFORMATIF, Nilai 70 – 84,9 sebagai Zona Biru.
3. CUKUP INFORMATIF, Nilai 55 – 69,9 sebagai Zona Kuning.
4. KURANG INFORMATIF, Nilai 30 – 54,9 sebagai Zona Merah.
5. TIDAK INFORMATIF, Nilai <29,9 sebagai Zona Hitam.

- KETIGA : Badan Publik Tidak Informatif dengan Zona Hitam sebagaimana diktum kedua yang terdapat pada lampiran I, tidak mendapatkan nilai dikarenakan tidak mengembalikan Self Assesmet Questioner (SAQ).
- KEEMPAT : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat memberikan penghargaan Apresiasi Khusus kepada Badan Publik yang dinilai memberikan kontribusi positif dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan tujuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 17 November 2020

/KOMISI INFORMASI KALIMANTAN BARAT

KETUA,


SYARIF MUHAMMAD HERRY

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 05 /KI.KALBAR/SK/11/2020
 TANGGAL : 17 November 2020

**PENETAPAN KUALIFIKASI PEMERINGKATAN DAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN KEPADA BADAN PUBLIK DALAM RANGKA
 MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN 2020**

A. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGK. PEMPROV KALBAR

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. KALBAR	98,04	INFORMATIF	HIJAU
2	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA. KALBAR	97,92	INFORMATIF	HIJAU
3	DINAS PERKEBUNAN PROV. KALBAR	97,57	INFORMATIF	HIJAU
4	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR	97,42	INFORMATIF	HIJAU
5	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG	97,36	INFORMATIF	HIJAU
6	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALBAR	97,11	INFORMATIF	HIJAU
7	INSPEKTORAT PROV. KALBAR	97,10	INFORMATIF	HIJAU
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR	96,42	INFORMATIF	HIJAU
9	DINAS SOSIAL PROV. KALBAR	94,78	INFORMATIF	HIJAU
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR	94,24	INFORMATIF	HIJAU
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR	94,02	INFORMATIF	HIJAU
12	BIRO ORGANISASI SETDA KALBAR	93,81	INFORMATIF	HIJAU
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. KALBAR	93,69	INFORMATIF	HIJAU
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR	92,46	INFORMATIF	HIJAU
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. KALBAR	92,15	INFORMATIF	HIJAU
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR	91,53	INFORMATIF	HIJAU
17	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA. KALBAR	89,79	INFORMATIF	HIJAU
18	DINAS KESEHATAN PROV. KALBAR	89,61	INFORMATIF	HIJAU
19	DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBR	87,75	INFORMATIF	HIJAU
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR	87,42	INFORMATIF	HIJAU

21	BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR	87.05	INFORMATIF	HIJAU
22	BADAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. KALBAR	86.06	INFORMATIF	HIJAU
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. KALBAR	85.97	INFORMATIF	HIJAU
24	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN PROV. KALBAR	85.17	INFORMATIF	HIJAU
25	RUMAH SAKIT JIWA PROV. KALBAR - SINGKAWANG	85.08	INFORMATIF	HIJAU
26	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR	85.04	INFORMATIF	HIJAU
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. KALBAR	83.15	MENUJU INFORMATIF	BIRU
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KALBAR	82.21	MENUJU INFORMATIF	BIRU
29	RSUD dr. SOEDARSO PONTIANAK	81.69	MENUJU INFORMATIF	BIRU
30	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR	81.13	MENUJU INFORMATIF	BIRU
31	BIRO PEMERINTAHAN SETDA. PROV. KALBAR	81.08	MENUJU INFORMATIF	BIRU
32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMPROV. KALBAR	80.82	MENUJU INFORMATIF	BIRU
33	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROV. KALBAR	80.51	MENUJU INFORMATIF	BIRU
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROV. KALBAR	79.94	MENUJU INFORMATIF	BIRU
35	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR	79.36	MENUJU INFORMATIF	BIRU
36	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASASETDA PROV. KALBAR	78.01	MENUJU INFORMATIF	BIRU
37	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA. PROV. KALBAR	77.64	MENUJU INFORMATIF	BIRU
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR	77.25	MENUJU INFORMATIF	BIRU
39	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. KALBAR	75.00	MENUJU INFORMATIF	BIRU
40	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR	63.39	CUKUP INFORMATIF	KUNING
41	BIRO HUKUM SETDA. PROV. KALBAR	62.63	CUKUP INFORMATIF	KUNING
42	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROV. KALBAR	59.01	CUKUP INFORMATIF	KUNING
43	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROV. KALBAR	57.52	CUKUP INFORMATIF	KUNING
44	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. KALBAR	55.75	CUKUP INFORMATIF	KUNING
45	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALBAR	50.18	KURANG INFORMATIF	MERAH

KATEGORI OPD PEMPROV. KALBAR		TAHUN		
PERINGKAT	NAMA BADAN PUBLIK	2018	2019	2020
1	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Red	Red	Green
2	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	White	White	Green
3	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Green	Green	Green
4	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Grey	Green	Green
5	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG	Yellow	Red	Green
6	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Green	Blue	Green
7	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Yellow	Green	Green
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	White	White	Green
9	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Grey	Green	Green
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Grey	Yellow	Green
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Red	Green	Green
12	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Yellow	Green	Green
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Green	Green	Green
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Grey	Green	Green
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Yellow	Green	Green
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Red	Blue	Green
17	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	White	White	Green
18	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Red	Blue	Green
19	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Grey	Green	Green

* Peringkat yang tertera merupakan hasil Monev di tahun 2020